

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN

**PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju bahwa pelaksanaan Urusan Persandian dilaksanakan oleh Bidang Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Bidang Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi;
2. Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
3. Pengujian Keamanan Sistem Elektronik;
4. Perjanjian Kerjasama Penerbitan Sertifikat Elektronik dengan Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, Bidang Persandian telah didukung dengan sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Bidang Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu Bidang Persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 18 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pt. KEPALA DINAS KOMINFOSIP MAMUJU



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Dasar Hukum 1

 B. Tujuan 2

BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN

 TAHUN 2025 3

 A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan 3

 B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan 5

 C. Permasalahan dan Rencana Tidak Lanjut Permasalahan 6

BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2024 8

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 9

 A. Kesimpulan 9

 B. Saran 9

LAMPIRAN 10

1. Daftar Kebijakan Keamanan Informasi 10

2. Sumber Daya Keamanan Informasi 11

 2.1. Daftar Materil Sandi 11

 2.2. Daftar Alat Pendukung Utama 12

 2.3. Daftar Sumber Daya Manusia Pelaksana Urusan Persandian 14

3. Daftar Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik 15

 3.1 Daftar Sistem Elektronik 15

 3.2 Daftar Aplikasi Persuratan Online/Elektronik 16

 3.3 Daftar Kelengkapan Pengelolaan Dokumen 17

4. Daftar Layanan Keamanan Informasi 18

5. Daftar Pola Hubungan Komunikasi Sandi 19

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.	Tabel 2.1 Realisasi Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3
2.	Tabel 2.2 Realisasi Program Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3
3.	Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Kegiatan Bidang Persandian Tahun 2024	4
4.	Tabel 2.4 Kegiatan dan Capaian Fungsional Sandiman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5
5.	Tabel 2.5 Kegiatan dan Capaian Fungsional Sandiman Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6
6.	Tabel 2.6 Kegiatan dan Capaian Fungsional Sandiman Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6
7.	Tabel 2.7 Tabel Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut	7
8.	Tabel 3.1 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi Tahun 2024	8
9.	Tabel 3.2 Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Tahun 2024	8
10.	Tabel 3.3 Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Tahun 2024	8

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
1.	Gambar 2.1 Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Persandian	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor : 001/2701.02/VII/2023, Nomor : PERJ.314/BSSN/BS/HK.07.02/07/2023 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
6. Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 455 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (SMKI);
7. Keputusan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024;
8. Keputusan Bupati Mamuju Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penyusunan Tim Asessor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024;

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan Persandian dalam satu tahun anggaran
2. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan persandian.

BAB II

HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN

TAHUN ANGGARAN 2024

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada Tahun 2024, Bidang Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki 2 (Dua) Program Kerja, 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub kegiatan. Sesuai dengan data pada Tabel di bawah ini, kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup Operasional memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 2 (Dua) kegiatan, sementara kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan memiliki jumlah yang paling sedikit yaitu sebanyak 1 (Satu) kegiatan. Realisasi kegiatan pada ruang lingkup Operasional memiliki capaian terendah dibandingkan dengan ruang lingkup kegiatan yang lainnya.

Dari 4 (Empat) kegiatan yang direncanakan, maka berdasarkan Realisasi Anggaran yang telah disediakan, ke 4 (Empat) kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan capaian 99,50%.

Tabel 2.1

Realisasi Program Penyelenggaraan Persandian

Untuk Pengamanan Informasi

No.	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1.	Fungsional Sandiman (Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	1	1	100 %
2.	Fungsional Sandiman (Penyedia Layanan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota)	2	2	100 %
	Total	3	3	100 %

Tabel 2.2

Realisasi Program Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi

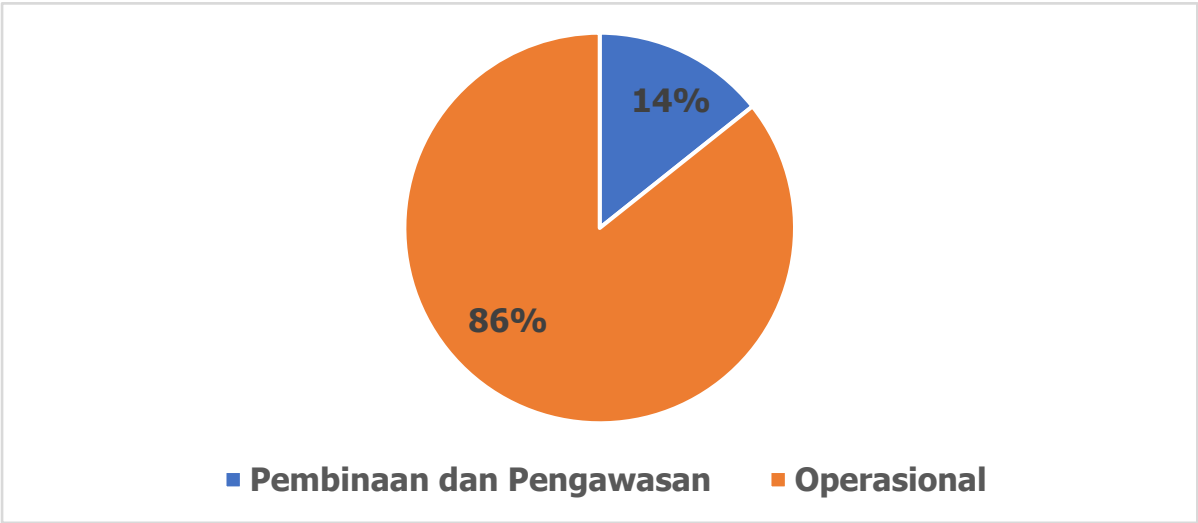
Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

No.	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1.	Fungsional Sandiman (Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintag Daerah Kabupaten Kota)	1	1	100 %
	Total	1	1	100 %

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Kegiatan Bidang Persandian
Tahun 2024

No.	Ruang Lingkup	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1.	Fungsional Sandiman (Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	2,300,000	2,228,600	96,90 %
2.	Fungsional Sandiman (Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	8,484.000	8,477.900	99,93 %
3.	Fungsional Sandiman (Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota)	4,875,000	4,873,000	99,96 %
Total		15,659,000	15,579,500	99,50 %

Gambar 2.1
Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Persandian



Sesuai dengan Tabel 2.3 dan Gambar 2.1 di atas, anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan Operasional memiliki alokasi paling besar, yaitu sebesar Rp. 13,359,000 atau (85,31 %) dari total anggaran. Anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp.2,300,000 atau (14,68%) dari total anggaran. Anggaran untuk kegiatan Pola Hubungan Komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp. 4,873,000 atau (99,9%) dari total anggaran. Dengan demikian, alokasi anggaran

yang berkaitan dengan kegiatan di Operasional Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju memiliki alokasi anggaran yang paling besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya.

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

1. Fungsional Sandiman (Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan operasional penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024, Fungsional Sandiman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Kegiatan dan Capaian Fungsional Sandiman
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan
Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

No.	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil (%)
1.	Kegiatan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2,300,000	2,228,600	96,90 %

2. Fungsional Sandiman (Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan operasional penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024, Fungsional Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Kegiatan dan Capaian Fungsional Sandiman
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

No.	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil (%)
1.	Radio SSB	5,760,000	5,760,000	100 %
1.	Perekaman dan Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)	2,724,000	2.717,900	99,78 %
	Total	8,484,000	8,477.900	99,93 %

3. Fungsional Sandiman (Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan operasional penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024, Fungsional Sandiman Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) telah melaksanakan beberapa kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Kegiatan dan Capaian Fungsional Sandiman
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

No.	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil (%)
1.	Kegiatan Pengelolaan email SANAPATI	4,875,000	4,873,000	99,9%

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut.
 Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni :

Tabel 2.7
Tabel Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi - Masih membutuhkan Sumberdaya Manusia (SDM) di Bidang Keamanan Siber dan Sandi - Masih kekurangan Sarana dan Prasarana pada Bidang Persandian - Masih membutuhkan tambahan Anggaran - Belum tersosialisasikannya Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju	- Pengusulan pengangkatan tenaga ASN di Bidang Keamanan Siber dan Sandi ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) - Melakukan pengusulan penambahan sarana dan prasarana ke Bagian Umum dan Perlengkapan - Melakukan pengusulan penambahan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Melakukan sosialisasi terkait keamanan informasi kepada seluruh Perangkat Daerah baik secara Luring maupun Daring
2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi - Masih membutuhkan Sumberdaya Manusia (SDM) di Bidang Keamanan Siber dan Sandi - Masih kekurangan Sarana dan Prasarana pada Bidang Persandian - Masih membutuhkan tambahan Anggaran - Belum tersosialisasikannya Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju	- Pengusulan pengangkatan tenaga ASN di Bidang Keamanan Siber dan Sandi ke BKPP - Melakukan pengusulan penambahan sarana dan prasarana ke Bagian Umum dan Perlengkapan - Melakukan pengusulan penambahan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi ASN lingkup Perangkat Daerah baik secara Luring maupun Daring
3.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah - Pendistribusian dokumen dari email Sanapati belum maksimal - Sarana dan prasarana belum memadai	- Menggunakan aplikasi persuratan SRIKANDI untuk mendistribusikan dokumen dari email Sanapati - Memanfaatkan media sosial (WhatsApp) untuk mendistribusikan dokumen dari email Sanapati (kepada staf pimpinan) - Melakukan pengusulan penambahan sarana dan prasarana ke Bagian Umum dan Perlengkapan

BAB III
PROGRAM KERJA TAHUN 2024

A. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi

Tabel 3.1
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Keamanan Informasi Tahun 2024

No.	Program Kerja	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
1.	Kegiatan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2,300,000	November s/d Desember 2024

B. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi

Tabel 3.2
Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Tahun 2024

No.	Program Kerja	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
1.	Penarikan Radio SSB	5,760,000	Desember 2024
2.	Perekaman dan Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)	2,724,000	Januari s/d Desember 2024

C. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah

Tabel 3.3
Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Tahun 2024

No.	Program Kerja	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
1.	Kegiatan Pengelolaan email SANAPATI	4,875,000	Januari s/d Desember 2024

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Program Kerja Urusan Persandian Tahun Anggaran 2024 di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju telah dilaksanakan dengan baik, sebagai berikut :

1. Pengajuan Anggaran Bidang Persandian Pada Tahun 2024 sebesar Rp. 15,572,900 dan Anggaran yang disahkan dalam DPA Sebesar Rp 15,659,000.
2. Dari anggaran yang telah di alokasikan tersebut, maka Bidang Persandian bertanggungjawab terhadap 2 Program Kerja, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
3. Pada penghujung Tahun 2024, Bidang Persandian telah berhasil melakukan capaian kerja berdasarkan realisasi anggaran berdasarkan point 1 dan 2 sebesar 99,50 Persen.

B. Saran

Demi pelaksanaan Program Kerja Urusan Persandian yang lebih baik pada masa yang akan datang, Bidang Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengusulan pengangkatan tenaga ASN di Bidang Keamanan Siber dan Sandi ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
2. Melakukan pengusulan penambahan sarana dan prasarana ke Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Melakukan pengusulan penambahan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kebijakan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Mamuju

No.	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi Ke -/Tahun
1.	SK Bupati Mamuju Nomor 455 Tahun 2024	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (SMKI) yang Menjadi Acuan dalam Melaksanakan Proses Manajemen Keamanan Informasi	2024	2025
2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju	2023	2027
3.	SK Bupati Mamuju No 32 Tahun 2024	Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024	2024	2025
4.	SK Bupati Mamuju No 33 Tahun 2024	Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024	2024	2025

Mamuju, 18 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. KEPALA DINAS KOMINFOSIP MAMUJU



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006

2. Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Mamuju

2.1 Daftar Material Sandi

No.	Nama Materil Sandi	Jumlah	Nomor Seri	NUP	Posisi	Pengadaan		Berita Acara Serah Terima (BAST)		Kondisi	Kesiapan Ops	Penggunaan
						Instansi	Tahun	Nomor	Tanggal	(B/R)	So/To	(Ag/Tg)
1.	Alat Jammer	1	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	BSSN	2019	-	-	R	-	-
2.	Radio Single Sideband (SSB)	5	-	-	Kabupaten Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	2018	-	-	B	-	-

Mamuju, 18 Februari 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS KOMINFOSIP MAMUJU

Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
 NIP : 19790102 201101 1 006

2.2 Daftar Alat Pendukung Utama

No.	Nama APU	Nomor Seri	NUP	Jumlah	Posisi	Pengadaan		Berita Acara Serah Terima (BAST)		Kondisi	Penggunaan	Keterangan
						Instansi	Tahun	Nomor	Tanggal	(B/R)	Ag/Tg	
1.	PC Unit / Komputer	-	-	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	2017	-	-	B	-	-
2.	Laptop	-	-	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	2017	-	-	B	-	Merk HP
3.	Printer	-	-	2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	- 2017 - 2002	-	-	B	-	- Merk HP Lazer Jet - Merk Epson L3211
4.	Radio Single Sideband (SSB)	-	-	5	Kabupaten Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	2018	-	-	B	-	Masing-masing 1 Unit yang berada di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju, Kantor Kecamatan Tommo,

												Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bala-Balakang (Merk Icom IC-718)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Mamuju, 18 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS KOMINFOSIP MAMUJU



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006

2.3 Daftar Sumber Daya Manusia Pelaksana Urusan Persandian

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan/TMT	Pendidikan		Pengadaan		Sertifikasi di Bidang Keamanan Informasi		Penghargaan di Bidang Persandian-Keamanaan Informasi		Tunjangan Pengamanan Persandian		Tugas Lain di luar Urusan Persandian
					Jenjang	Tahun Lulus	Nama Pelatihan	Tahun	Nama Sertifikasi	Tahun	Nama Penghargaan	Tahun	Dapat	Tidak Dapat	
1.	Ilham, S.Ip.	198103292008011012	Penata Tk.1 III-d	Kepala Bidang/ 18 Maret 2024	S1	2005	-	-	-	-	-	-	√	-	-
2.	Muliadi, ST., MT.	197404212007011020	Pembina IV-a	Sandiman Ahli Muda/ 30 Desember 2021	S2	2014	-	-	-	-	-	-	√	-	-
3.	Yahya Permadi, SE.	19791123 2007011011	Penata Tk.1 III-d	Sandiman Ahli Muda/ 30 Desember 2021	S1	2012	-	-	Training HPRC - 6B Operational dari BSSN	2019	-	-	√	-	-
4.	Dewi Susanti, SE.	196802082001122002	Penata Tk.1 III-d	Sandiman Ahli Muda/ 30 Desember 2021	S1	2004	-	-	-	-	-	-	√	-	-
5.	Baharuddin	198407102012121003	Pengatur III-c	Pengadministrasi Umum/ Januari 2024	SMU	2002	-	-	-	-	-	-	√	-	-

Mamuju, 18 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. KEPALA DINAS KOMINFOSIP MAMUJU



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006

3. Daftar Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik Pemerintahan Kabupaten Mamuju

1.1 Daftar Sistem Elektronik

No.	Nama Sistem Elektronik	Kategori Sistem Elektronik (Strategis/Tinggi/Rendah)	Pengelola Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal Yang Sudah Terpasang*	Uji Keamanan Sistem Elektronik		Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Uji (Dalam Bentuk Presentase)		
					Pelaksana	Tahun	Telah	Sedang	Belum
1.	Website Resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju	Strategis	Bidang Aptika DISKOMINFOSIP Mamuju	- Firewall - BackUp Data	-	-	-	-	-
2.	Website Resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	Strategis	Bidang Aptika DISKOMINFOSIP Mamuju	- Firewall - BackUp Data	-	-	-	-	-
3.	Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamuju	Tinggi	- Bidang Aptika DISKOMINFOSIP Mamuju - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Mamuju	- Firewall - BackUp Data	-	-	-	-	-
4.	Absensi SIKEREN	Strategis	- BKPP Mamuju - DISKOMINFOSIP Mamuju	- Firewall - BackUp Data	-	-	-	-	-
5.	Aplikasi LOPIS	Strategis	DISDUKCAPIL Mamuju	- Backup Data	-	-	-	-	-
6.	Sim BAPENDA (NPWPD)	Strategis	BAPENDA Mamuju	- Firewall - Backup Data	-	-	-	-	-
7.	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	Tinggi	RSUD Mamuju	- Firewall - Backup Data	-	-	-	-	-
8.	Aplikasi SAKIP	Strategis	Bagian Organisasi	- Backup Data	-	-	-	-	-

Keterangan :

*Bentuk pengamanan pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;

Mamuju, 18 Februari 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS KOMINFOSIP MAMUJU

Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
 NIP : 19790102 201101 1 006

1.2 Daftar Aplikasi Persuratan Online/Elektronik

No.	Nama Aplikasi Persuratan	Pihak Yang Terhubung			Bentuk Pengamanan Yang Sudah Terpasang	Media Akses		Jaringan Akses	
		TU Perangkat Daerah	Eselon 1 dan Eselon 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/Laptop	Intranet	Internet
1.	SANAPATI	√	-	-	√	-	√	-	√
2.	SRIKANDI	√	√	√	√	√	√	-	√

(Khusus bagi Pemerintahan Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik, misal e-surat)

Mamuju, 18 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS KOMINFOSIP MAMUJU



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006

1.3 Daftar Kelengkapan Pengelolaan Dokumen

a. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No.	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1.	Klasifikasi Informasi		-	-	-	-
2.	Jadwal Retensi Arsip		-	-	-	-
3.	Pemusnahan Arsip		-	-	-	-
4.	Permintaan Informasi/Dokumen	√		SOP Pembuatan Sub Domain Nomor : 188.45/26/SOP/I/2020/Diskominfosandi	2022	2024
5.	Distribusi Informasi/Dokumen	√		SOP Pengagendaan dan Pendistribusian Penerimaan Berita/Surat Melalui Email SANAPATI Nomor : 188.45/24/SOP/I/2022/Diskominfosandi	2022	-

b. Pemusnahan Dokumen

No.	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksana Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

Mamuju, 18 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. KEPALA DINAS KOMINFOSIP MAMUJU



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006

4. Daftar Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju

No.	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat	Pegawai	Perangkat
1.	Pembuatan dan Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)	2023 – 2025	-	√	ASN di seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju

Keterangan :

- *Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"
- **Dapat menyebutkan perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdinass, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"
- ***Dengan menyebutkan nama perangkat daerah.

Mamuju, 18 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS KOMINFOSIP MAMUJU



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006

5. Daftar Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju

No.	Nama JKS	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi Yang Digunakan
1.	Persuratan melalui Email SANAPATI	Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju	Komputer dan Internet	-

Keterangan :

*JKS Internal Pemerintahan Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan Unit Kerja di dalam perangkat daerah.

Mamuju, 18 Februari 2025

